

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :

Erma Yuliyati
NIM. 14.0102.0134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 201**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Erma Yuliyati
NIM. 14.0102.0134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Erma Yuliyati

NPM 14.0102.0134

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2018

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Muh. Al Amin, S.E., M.Si.

Pembimbing I

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing II

Tim Penguji

Muh. Al Amin, S.E., M.Si.

Ketua

Muji Murnadi, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

06 OCT 2018

Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erma Yuliyati
NIM : 14.0102.0134
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH (SAKD) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 29 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan



Erma Yuliyati
NIM. 14.0102.0134

RIWAYAT HIDUP

Nama : Erma Yuliyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 16 Juli 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Karanganyar 06/12, Banyubiru, Dukun, Magelang
Alamat *e-mail* : ermayulie19@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2002-2008) : SDN Banyubiru 02
SMP (2008-2011) : SMP N 2 Muntilan
SMA (2011-2014) : SMA N 1 Dukun
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 29 Agustus 2018

Peneliti

Erma Yuliyati
NIM. 14.0102.0134

MOTTO

Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

(Q.S. Ali Imran: 160)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar-Ra,d: 11)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang).”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Muh. Al Amin, SE., M.Si. dan Ibu Farida, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran terhadap perbaikan skripsi.
5. Ibu Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen penguji 1 (satu) dan Ibu Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si. selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Keluarga saya yang selalu memberikan do'a dan dukungan moril serta materiil untuk saya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 29 Agustus 2018
Peneliti

Erma Yuliyati
NIM. 14.0102.0134

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori	12
1. Teori <i>Stewardship</i>	12
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemda	13
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia	14
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	14
5. Sistem Pengendalian Internal	15
6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	16
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	16
C. Perumusan Hipotesis.....	18
D. Model Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	29
B. Data Penelitian	30
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	31
D. Metode Analisis Data	34
E. Pengujian Hipotesis.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian.....	41
B. Statistik Deskriptif Penelitian	42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
D. Uji Validitas Data.....	45
1. Uji Validitas Instrumen	45
2. Uji Reliabilitas Instrumen	47
E. Uji Hipotesis.....	48
1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	48

2. Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	48
3. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	52
F. Pembahasan.....	56
G. Pembahasan Secara Menyeluruh.....	65
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	69
B. Keterbatasan Penelitian	70
C. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016.....	3
Tabel 1.2 Opini LKPD Kab. Magelang Tahun 2012-2016.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	41
Tabel 4.2 Profil Responden.....	42
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i>	45
Tabel 4.5 Pengujian Reliabilitas	47
Tabel 4.6 <i>Fit Summary</i>	48
Tabel 4.7 rms Theta.....	48
Tabel 4.8 <i>P-value</i>	49
Tabel 4.9 <i>Sobel Test</i>	53
Tabel 4.10 Hasil Hipotesis	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	28
Gambar 3.1 Prosedur Mempertahankan atau Menghapus Indikator Reflektif.....	37
Gambar 3.2 Diagram <i>Path Analysis</i>	40
Gambar 4.1 Hasil <i>Output Model (Fit Model)</i>	50
Gambar 4.2 Uji t Variabel Kompetensi SDM.....	50
Gambar 4.3 Uji t Variabel Pemanfaatan TI	51
Gambar 4.4 Uji t Variabel SPI	51
Gambar 4.5 Sobel <i>test I</i>	53
Gambar 4.6 Nilai Kritis Uji t Kompetensi SDM	54
Gambar 4.7 Sobel <i>test II</i>	54
Gambar 4.8 Nilai Kritis Uji t Pemanfaatan TI	55
Gambar 4.9 Sobel <i>test III</i>	55
Gambar 4.10 Nilai Kritis Uji t SPI.....	56

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	76
Lampiran 2 Daftar Sampel.....	84
Lampiran 3 Tabulasi Data Mentah.....	85
Lampiran 4 Tabulasi Data Diolah.....	96
Lampiran 5 Statistik Deskriptif.....	104
Lampiran 6 Model Penelitian Intervening.....	104
Lampiran 7 Uji Validitas (<i>Cross Loading</i>).....	105
Lampiran 8 Pengujian Reliabilitas.....	106
Lampiran 9 <i>R-square</i>	106
Lampiran 10 <i>Fit Summary</i>	107
Lampiran 11 rms Theta.....	107
Lampiran 12 <i>P-value</i>	107
Lampiran 13 Sobel <i>test</i> Regresi I.....	108
Lampiran 14 Sobel <i>test</i> Regresi II.....	109
Lampiran 15 Surat Permohonan Ijin Riset Fakultas.....	110
Lampiran 16 Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol.....	111
Lampiran 17 Tanda Terima Kesioner.....	112

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang)

Oleh:

Erma Yuliyati

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang SAP, Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*), dan dapat di bandingkan (*comparability*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel intervening pada pemerintahan di OPD Kabupaten Magelang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*. Kuesioner yang bisa digunakan sebanyak 53 kuesioner. Sampel penelitian yang digunakan adalah Kabid/Kasub. Keuangan, Verifikator Keuangan, Bendahara, Staf/Sub.Keuangan di OPD Kabupaten Magelang yang berhubungan dengan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis *Smart PLS* dan Sobel Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening.

Kata kunci: *kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPI, SAKD, kualitas laporan keuangan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang dilakukan secara kontinyu pada setiap periode tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yang mencerminkan berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan perubahan informasi baik untuk akuntansi maupun administrasi publik bagi keterbukaan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pembangunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah.

Informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah melalui publikasi dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang terpublikasi itu sangat diperlukan oleh banyak pihak untuk bahan pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan LPKD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan *financial* yang terdiri dari neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*), dan dapat di bandingkan (*comparability*).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak

Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya pada LKPD. Saat ini, perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (TMP). Berikut ini adalah perkembangan opini LKPD tahun 2012-2016:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016

LKPD (Tahun)	OPINI			
	WTP	WDP	TW	TMP
2012	23%	61%	1%	15%
2013	30%	59%	2%	9%
2014	47%	46%	1%	6%
2015	58%	36%	1%	5%
2016	70%	26%	0 %	4%

Sumber: IHPS BPK RI Semester II Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan opini LKPD tahun dari 2012 sampai 2016 secara menyeluruh dalam 5 tahun terakhir mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 47 poin persen, yaitu dari 23% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 poin persen dari 15% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 4% pada LKPD Tahun 2016. Hal yang sama juga dialami oleh LKPD Kabupaten Magelang, dimana dari tahun 2012-2015 selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun pada

tahun 2016 LKPD Kabupaten Magelang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 1.2
Opini LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016

LKPD (Tahun)	OPINI
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WTP

Sumber: IHPS BPK RI Semester II Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa pemerintah kabupaten Magelang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam tahun anggaran 2012-2015, akan tetapi ditahun anggaran selanjutnya mengalami peningkatan opini yaitu untuk tahun 2016 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemilihan pemerintah daerah kabupaten Magelang sebagai objek penelitian karena pemda kabupaten Magelang dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan meningkatkan opini pemeriksaan BPK dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, hal ini diduga karena kompetensi sumber daya manusia, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Magelang, serta sistem pengendalian internal yang memadai dari pengelola keuangan daerah, akan tetapi bagaimana kualitas laporan keuangan setelah diterapkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dalam pemerintah daerah untuk memediasi hubungan tersebut. Kondisi ini menarik bagi peneliti untuk mencari tahu apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan

teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan SAKD sebagai variabel intervening.

Saat ini tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas semakin ke depan akan semakin tinggi, karenanya perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kabupaten Magelang ini setidaknya bisa menjadi cermin bagi keberhasilan kinerja aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada publik. BPK RI dalam memberikan opini WTP untuk kabupaten Magelang juga bukan tanpa alasan, BPK mengharapkan adanya wujud komitmen perbaikan tata kelola keuangan secara nyata dan terarah kepada pemda. Upaya-upaya perbaikan itu dapat berupa perbaikan kompetensi SDM, perbaikan pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan sistem pengendalian internal yang dapat pula dimediasi dengan sistem akuntansi keuangan daerah.

Akuntabilitas sendiri bertanggungjawab atas sumber daya manajemen dan implementasi kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Untuk membangun pemerintahan yang baik, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimanfaatkan, maka akan semakin baik kinerja yang akan diperoleh dan hal tersebut akan menjadi dasar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Kompetensi sumber daya manusia sendiri dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang

pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Hal kedua yang dapat menganalisa pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi serta memudahkan proses audit laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan manajer keuangan pemerintah melalui formulasi dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Oleh

karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diperlukan. Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak dipahami maka akan mengganggu kelangsungan keuangan pemerintah daerah dan tujuan yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan harapan.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia pernah dilakukan oleh Muda dkk (2017), Rasyidah dan Hasyim (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah dilakukan oleh Muda dkk (2017), Utama (2017), Cahyo dan Basukianto (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah dan Hasyim (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai sistem pengendalian internal pernah dilakukan oleh Utama (2017), Mokoginta dkk (2017), dan Herawati (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Muda dkk (2017) yang meneliti mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten

Labuhanbatu. Alasan peneliti meneliti kualitas laporan keuangan adalah karena laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari suatu entitas serta menjadi media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak yang membutuhkan.

Perbedaan penelitian ini berdasarkan dengan saran penelitian sebelumnya adalah **pertama**, menambah variabel independen yaitu sistem pengendalian internal (SPI), jika SPI telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya, dan data akan terkendali, tujuan akan tercapai, risiko dapat diminimalisir, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah kecurangan akuntansi sehingga kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan (Winidyaningrum, 2010). **Kedua**, penelitian ini dilakukan di OPD Kabupaten Magelang karena meskipun Kabupaten Magelang sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK pada tahun 2016, Kabupaten Magelang tetap harus mempertahankan opini BPK tersebut dengan cara menjaga kestabilan kualitas laporan keuangannya dengan cara memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening?
6. Apakah SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui dan menguji pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Mengetahui dan menguji pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Mengetahui dan menguji pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Mengetahui dan menguji pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening.
5. Mengetahui dan menguji pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening.

6. Mengetahui dan menguji pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan juga peneliti terhadap bukti empiris terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemda. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi Pemerintah Daerah mengenai pengaruh dan peran dari kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat praktis:

Bagi Pemerintah, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendeskripsikan sejauh mana pengaruh-pengaruh yang meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis. Bab ini mengemukakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang diambil dari beberapa literatur. Selain itu, dalam bab ini disajikan pula penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini, perumusan hipotesis, serta model penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara lebih mendalam, yang meliputi; statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian validitas dan reliabilitas, hasil pengujian hipotesis, pembahasan, dan pembahasan secara menyeluruh.

Bab V Kesimpulan. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi. Pada bagian ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Berdasarkan teori *stewardship* Donaldson dan Davis, (1991), hubungan antara prinsipal yaitu DPRD dan *steward* yaitu pemda yang saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama perusahaan karena *steward* semata-mata tidak hanya ingin mencari keuntungannya sendiri. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *steward* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal tersebut dapat memicu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, dan sistem pengenalan internal yang baik pada pemerintah dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebagai variabel intervening dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2010:245). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah ukuran ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut:

- a. Relevan: Laporan Keuangan bisa di katakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna.
- b. Andal: Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur.
- c. Dapat Dibandingkan: Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- d. Dapat di pahami: Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No. 11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan OPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson, dkk 2000). Pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data. Pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang

memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

Dalam PP No.60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini bertujuan untuk penataan yang terstruktur terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Muda. I, dkk. (2017)	Variabel Independen: Kompetensi SDM dan Pemanfaatan TI Variabel Intervening: SAKD	Kompetensi SDM dan Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
2.	Nadir, R., & Hasyim, (2017)	Variabel Independen: Pemanfaatan TI dan Kompetensi SDM Variabel Intervening: SAP Berbasis Akrua	Pemanfaatan TI berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAP Berbasis Akrua sebagai variabel intervening dan Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAP Berbasis Akrua sebagai variabel intervening.
3.	Utama (2017)	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, Penerapan SAKD, dan SPI	Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, Penerapan SAKD, dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Mokoginta, Lambey, dan Pontoh (2017)	Variabel Independen: SPI dan SAKD	SPI dan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Evicahyani dan Setiawina (2016)	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Pemanfaatan SIPKD Variabel Intervening: SPIP	Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan SPIP sebagai variabel intervening.
6.	Pradono, F. C. (2015)	Variabel Independen: Kompetensi SDM, TI, Peran PPK-SKPD, Rekonsiliasi, dan SPI	Kompetensi SDM, TI, Peran PPK-SKPD, Rekonsiliasi, dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Herawati (2014)	Variabel independen: SPI	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: data penelitian terdahulu, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”.

Berdasarkan teori *stewardship* Donaldson dan Davis, (1991), hubungan antara prinsipal yaitu DPRD dan *steward* yaitu pemda yang saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama perusahaan karena *steward* semata-mata tidak hanya ingin mencari keuntungannya sendiri. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *steward* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Maka kualitas laporan keuangan akan meningkat dengan sendirinya karena kedua belah pihak menjaga kepentingan bersama. Hal tersebut akan lebih baik dilaksanakan apabila kompetensi sumber daya manusia yang baik juga terdapat pada OPD pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Karena dengan mempekerjakan para pegawai

pemerintah daerah yang berkompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Muda dkk (2017), Utama (2017), dan Evicahyani, Setiawina (2016) mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan semakin baik kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misinya. Apabila pemda dalam hal ini mencari pegawai dengan SDM yang berkompeten maka akan diyakini dalam memroses laporan keuangan juga akan semakin berkualitas. Karena dengan semakin baik kompetensi SDMnya maka akan semakin meningkat pula pemahamannya dalam menjalankan tugas yang diberikan dan akan berdampak pada kualitas dari sebuah laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan

daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No. 11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* Donaldson dan Davis (1991), *steward* semata-mata tidak hanya ingin mencari keuntungannya sendiri. Kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, karena *steward* bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal dan tujuan perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan apabila memanfaatkan teknologi informasi yang baik pada pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan akan lebih memaksimalkan kinerja dari para *steward*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muda dkk (2017), Utama (2017), dan Pradono (2015) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh

Nadir dan Hasyim (2017) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Teknologi informasi disini dapat diartikan sebagai pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi dari komputer dan jaringan yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi secara cepat, murah, dan mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi serta data yang dihasilkan akan lebih akurat. Hal tersebut tentunya juga akan meningkatkan kualitas dari sebuah laporan keuangan apabila pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dengan baik bagi para *steward* karena mereka akan bekerja dengan lebih cepat dan mudah bagi tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Penyimpangan dan kebocoran yang masih banyak ditemukan di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017).

Hal tersebut dapat dicegah apabila dilakukan sistem pengendalian internal yang baik pada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2017), Mokoginta, Lambey, Pontoh (2017) dan Herawati (2014) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk memberi jaminan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*).

Oleh karena itu penting dilakukan pengendalian internal dalam pemda agar kecurangan yang terjadi karena diakibatkan oleh para pegawai pemda dapat terminimalisir. Minimnya akses kecurangan tersebut akan berakibat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pada pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai Variabel Intervening.

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Penelitian Muda dkk (2017) mengungkapkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAKD sebagai variabel intervening. Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2017), Mokoginta, Lambey, Pontoh (2017), dan Evicahyani, Setiawina (2016) menunjukkan bahwa kompetensi SDM, dan penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misinya. Sedangkan SAKD yang dapat berfungsi sebagai prosedur dalam mempertanggungjawabkan semua kegiatan APBD pemda, dapat menjadi media bagi sumber daya manusia (pegawai) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena semua hal yang akan dikerjakan sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebagai variabel intervening.

5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai Variabel Intervening.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan

keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No. 11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Penelitian Muda dkk (2017) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAKD sebagai variabel intervening. Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2017), Mokoginta, Lambey, Pontoh (2017), dan Pradono (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang mempermudah kerja SDM serta mempermudah akses bagi pengguna laporan keuangan. Hal tersebut juga membantu pemerintah daerah, karena dengan memanfaatkan teknologi dapat meminimalisir kesalahan yang akan ditimbulkan. Pemanfaatan teknologi yang tidak berlebihan dan digunakan sesuai prosedur SAKD serta peraturan yang ada juga mampu

meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Karena apabila dalam memanfaatkan teknologi informasi tidak sesuai dengan prosedur yang ada nantinya akan menimbulkan sebuah kasalahan maupun kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebagai variabel intervening.

6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai Variabel Intervening.

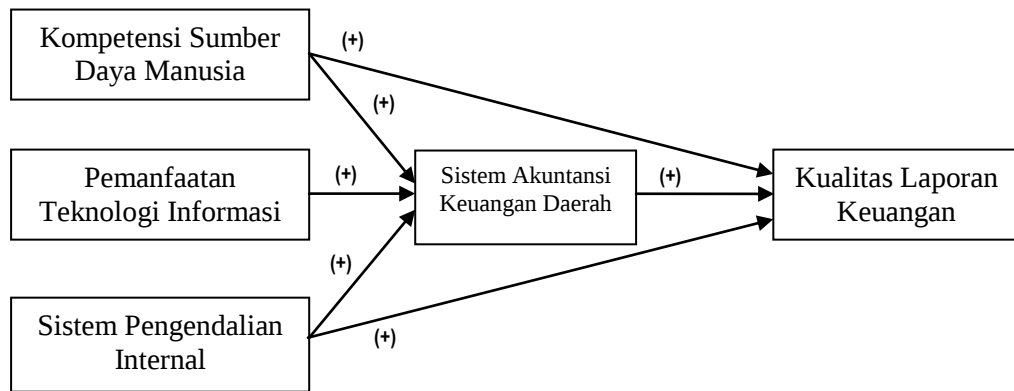
Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara

manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2017), Mokoginta, Lambey, Pontoh (2017), Pradono (2015) dan Herawati (2014), mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) dan penerapan SAKD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal pada pemda penting dilakukan karena hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa sebuah organisasi sudah melakukan kegiatan yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam memberikan jaminan bahwa sebuah organisasi memang sudah berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diserasikan dengan prosedur sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang ada pada pemda tersebut, karena SAKD merupakan prosedur yang mempertanggungjawabkan semua kegiatan APBD pada pemda.

Apabila sistem pengendalian internalnya memang sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada maka proses pembuatan laporan keuangannya juga bisa dibilang baik dan berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebagai variabel intervening.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD pada Kabupaten Magelang.

Sedangkan sampel menurut Sekaran (2006 : 123) adalah bagian yang terdiri dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan dari dinas/kantor/badan atau Kabid/Kabag/Kasubsie pada OPD di kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Penentuan kriteria sampling meliputi:

1. Mempunyai masa kerja minimal dua tahun dengan pertimbangan manajer sudah cukup dalam menilai kinerjanya sendiri dengan baik.
2. Menduduki posisi jabatan yang terlibat dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada setiap unit OPD.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner tentang hal itu. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel dependen

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (SAP, 2010:245). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah ukuran ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristiknya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas laporan keuangan di adopsi dari penelitian Roviyantje (2012) dilihat dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP). Pernyataan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang di mulai dari skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukan “sangat setuju”.

2. Variabel independen

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk kinerja, untuk

menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kompetensi sumber daya manusia dapat di lihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah di ikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di adopsi dari penelitian Roviyantie (2012) diukur dengan tiga indikator yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pernyataan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukan “sangat setuju” .

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Jumlah item pernyataan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator yaitu sistem akuntansi sesuai SAP, jaringan internet, jaringan internet termanfaatkan dengan baik, aplikasi yang digunakan, laporan keuangan terkomputerisasi dengan baik, *software* sesuai dengan UU.

c. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013 : 163).

Karakteristik Sistem Pengendalian Internal diadopsi dari penelitian Windiastuti (2013) diukur dengan lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Pernyataan yang diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 menunjukkan “sangat setuju”.

3. Variabel intervening

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara

manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Karakteristik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut di adopsi dari penelitian Roviyantje (2012) di ukur dengan empat indikator yaitu: identifikasi, pengklasifikasian, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas, menghitung masing-masing pengaruh operasi. Pernyataan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean, dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2016:19).

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas merupakan tingkat kemampuan

suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Item kuesioner dikatakan valid jika koefisien nilainya diatas 0,5. Validitas instrumen dievaluasi berdasarkan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya yang dihitung dengan menggunakan PLS. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi (*outer loading*) antara skor item atau indikator (*composite score*) dengan skor konstruk (Ghozali, 2016).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* dan *Composite reliability* dalam PLS, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016: 43).

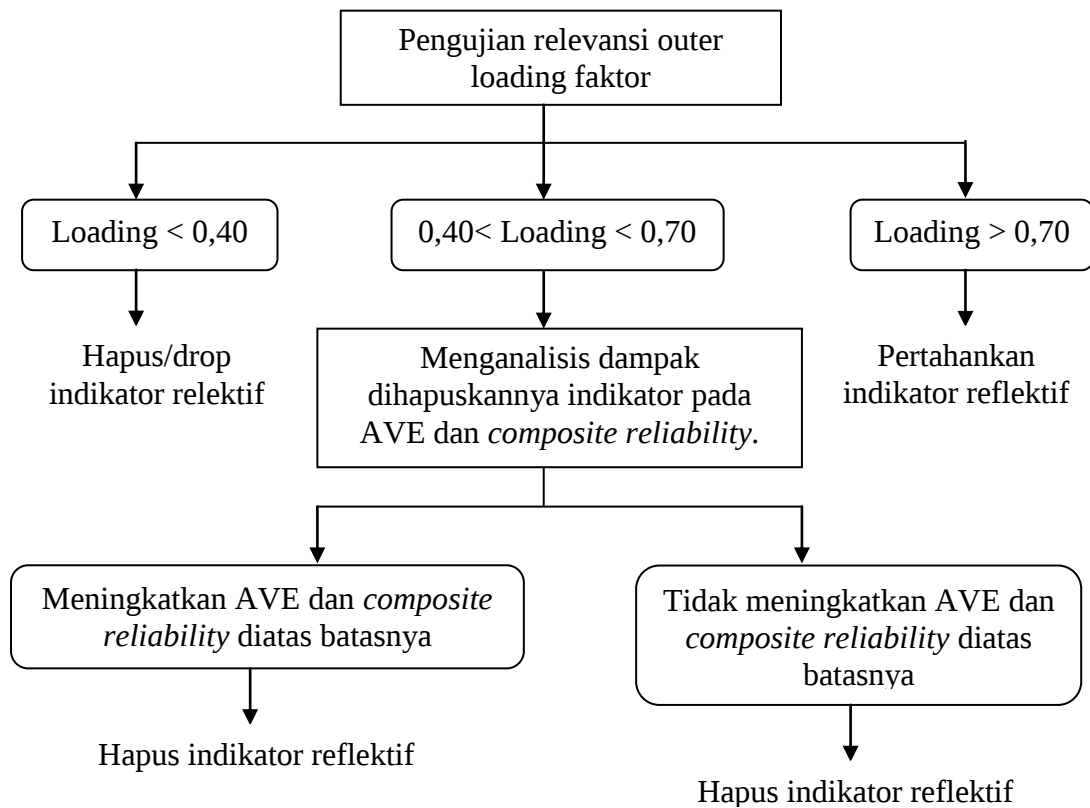
Cronbach Alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *Composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Jika koefisien *Cronbach Alpha* dan *Composite reliability* $> 0,7$ maka pernyataan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach Alpha* dan *Composite reliability* $\leq 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali, 2016 : 43).

E. Pengujian Hipotesis

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian model pengukuran digunakan untuk memvalidasi model penelitian yang dibangun. Pada penelitian ini tidak dapat dilakukan uji reliabilitas karena masing-masing indikator reflektif dalam suatu variabel laten diasumsikan tidak saling berkorelasi (independen) sehingga nilai reliabilitasnya tidak dapat diukur. Maka, untuk uji validitas pada konstruk reflektif akan dicerminkan pada *outer weight/output indicator weight*. *Output indicator weight* menyajikan bobot (*weight*) indikator pada perhitungan variabel latennya. Setiap skor variabel laten dihitung sebagai sebuah kombinasi linier dari indikator-indikatornya, dimana bobot merupakan koefisien regresi berganda yang menghubungkan indikator-indikator pada variabel laten.

Evaluasi kelayakan pengukuran variabel laten reflektif menggunakan dua kriteria, yang pertama bobot (*weight*) harus signifikan ($p\text{-value} < 0,05$) dan kedua nilai VIF $< 3,3$. Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka pengukuran konstruk reflektif telah dinilai layak. Berikut ini adalah prosedur yang disarankan oleh Hair dkk (2013) untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghapus indikator reflektif:



Gambar 3.1
Prosedur Mempertahankan atau Menghapus Indikator Reflektif

2. Model Struktural (*Inner Model*)

a. *Output General Result*

Output General Result akan menampilkan bagian *model fit indices* dan *P values* dengan hasil enam indikator fit yaitu *standardized root mean square residual (SRMR)*, *d_ULS*, *d_G*, *chi-square*, *normed fit index (NFI)*, dan *rms Theta*. Nilai SRMR harus < 0,8 dan NFI harus mendekati 1, dan nilai rms Theta harus mendekati nol untuk menunjukkan model tersebut *fit* (Ghozali, 2014).

b. *Output Model*

Output Model merupakan salah satu hasil output yang terpenting dalam pengambilan keputusan pengujian dengan PLS. *Output Model* akan memberikan ringkasan informasi mengenai model penelitian dan nilai hasil pengujian baik nilai *R squared*, nilai *path coefficient* (nilai koefisien β), serta nilai *p-value* dalam bentuk gambar model penelitian. Hasil tersebut juga ditunjukkan pada *output latent variabel coefficient*. Hipotesis nol (H_0) ditolak jika *p-value* menunjukkan nilai $> 0,05$ dan nilai *path coefficient* (nilai koefisien β) menunjukkan nilai positif.

Sebaliknya, hipotesis nol (H_0) diterima jika *p-value* menunjukkan nilai $< 0,05$. Koefisien determinasi menggunakan *R-squared* menunjukkan berapa presentase variansi konstruk endogen (dependen) dapat dijelaskan oleh variabel eksogen (independen). Semakin tinggi nilai *R-squared* menunjukkan model yang baik. Sedangkan nilai *path coefficient* (nilai koefisien β) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

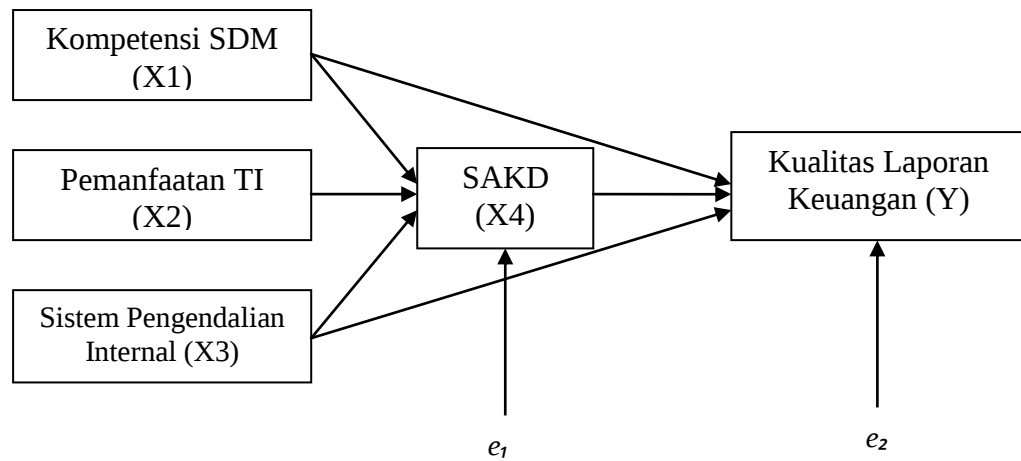
3. Pengujian Variabel Intervening

a. Analisis jalur (*path analysis*)

Metode analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. *Path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan

untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model *causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis (Ghozali, 2013).

Model *path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung seprangkat variabel independen terhadap variabel dependen. *Path analysis* digunakan dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur hubungan variabel X, Y, dan Z. Analisis korelasi sebagai regresi yang merupakan dasar dari perhitungan koefisien jalur. Model diagram *path analysis* yang digunakan yaitu:



Gambar 3.2
Diagram *Path Analysis*

Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$X_4 = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_1 \quad (a)$$

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e_2 \quad (b)$$

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan Keuangan
 X_1 : Kompetensi SDM
 X_2 : Pemanfaatan TI
 X_3 : Sistem Pengendalian Internal
 X_4 : Sistem Akt. Keu. Daerah
 b_1 : Koefisien regresi Komp. SDM

b_2 : Koefisien regresi ti
 b_3 : Koefisien regresi SPI
 b_4 : Koefisien regresi SAKD
 e_1 : Residual
 e_2 : Residual

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengujian hipotesis serta analisis dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji model menunjukkan bahwa nilai SRMR adalah sebesar 0,096 yang menunjukkan $< 0,1$, nilai NFI adalah sebesar 0,435 nilai tersebut mendekati 1, dan nilai rms Theta 0,207 nilainya mendekati nol yang artinya ketiga nilai tersebut telah memenuhi syarat bahwa model tersebut adalah *fit*.
2. Hasil uji *p-value* dan Sobel *test* menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, bahwa kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening tidak berpengaruh. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan SAKD sebagai variabel intervening berpengaruh positif.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu Kabupaten. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digeneralisasikan ke semua objek mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner dan dibagikan ke OPD dan diambil beberapa hari kemudian atau sesuai dengan kesepakatan. Namun, waktu pengembalian kuesioner yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati menjadi kendala peneliti dalam pengambilan kuesioner.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel yang digunakan dengan hanya menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperluas objek penelitian dengan menambahkan OPD dari kabupaten lain atau bahkan pada tingkat di atasnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar peneliti tegas dalam pemberian jadwal pengembalian kuesioner agar responden tepat waktu dalam mengembalikan kuesioner yang telah disebar.

3. Penelitian selanjutnya peneliti perlu menambahkan beberapa variabel lain, seperti variabel Pengaruh *Good Government Governance* berdasar penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Tamrin (2017), Implementasi Akuntansi Akrual berdasar penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017), Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, dan Pelatihan berdasar penelitian yang dilakukan oleh Wungow, Lambey, dan Pontoh (2016), yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan agar hasil yang diuji lebih memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, Muhammad Sjukrul. (2010) *Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di Provinsi Sumatera Barat*, (Online), (<http://sumaterabarat.prov.go.id/>, diakses 4 Juli 2016).
- Azhar. 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Tesis, Medan, USU, Medan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. Daftar Opini Audit LKPD. (Online). Tersedia: http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/II/ihpsii2017_1414644515.pdf
- Donaldson. Lex, Davis James H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return*. Australian Journal of Management, Vol. 16
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (8th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (8th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (8th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR–Study & Accounting Research*, 11 (1), 1-14.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir), dalam *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli. Pontianak.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Mahsun, dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.

- Mardiasmo, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku seri membudayakan akuntabilitas publik: Penerbit UPP STIM YKPN
- Muda, I., Wardani, D. Y., maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). *The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening*. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 95 (20).
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat. Jakarta.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2).
- Nadir, R., & Hasyim. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Baru). *Jurnal online* <http://journal.feb.unmul.ac.id> Akuntabel, 14 (1).
- Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010.
- Pradono, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22 (2).
- Roviyantie, Devi. 2012. "Pengaruh Kompetensi SDM dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (survey pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)
- Sari, I. M., & Tamrin, N. A. (2017). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN

- KEUANGAN (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 1(1).
- Sekaran, U. 2006. *Research Methoda for Business; A Skilll Building Approach*. John Wiley and Sons, Inc. Singapore 3rd Edition.
- Sholihin, Mahfud, dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0*. Yogyakarta: Andi.
- Suci Rahmadani 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)*. Jurnal Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Ulfa, R., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERSEPSI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI KABUPATEN BONDOWOSO. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(2), 176-186.
- Umar, J. (2011). *Analisa faktor konfirmatori*. Bahan ajar, tidak dipublikasikan. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Utama, R. J., Tanjung, A. R., & Sofyan, A. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4 (1), 1429-1443.
- Wahyono, Teguh. (2004) *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (3).
- Wilkinson, Josep W. Et al. 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*. 4 Edition, John Willey & Sons Inc. New York-USA.

- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN), *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. 13-14 Oktober. Purwokerto.
- Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 7(2).

